



KORAN	HAL
Haluan	12
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Bulan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																			



TIM PEMERIKSA—Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur menerima Tim BPK RI Perwakilan Sumbar, Senin (3/2).ALDI

Pemeriksaan LKPD Padang Pariaman 2024 Dimulai

PADANG PARIAMAN, HALUAN- Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur menerima Tim BPK RI Perwakilan Sumbar, Senin (3/2).

Tim tersebut akan melaksanakan pemeriksaan interim terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Padang Pariaman tahun 2024.

Pemeriksaan berlangsung selama 27 hari yakni tanggal 3 Februari sampai 1 Maret 2025 dengan mengambil sampel pemeriksaan atas sejumlah OPD.

Turut hadir mendampingi Suhatri Bur, Ketua DPRD Padang Pariaman Aprinaldi, Sekretaris Daerah Rudy Renaldi Rilis, dan seluruh kepala

perangkat daerah.

Suhatri Bur menyampaikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Sumbar ini sangat bermanfaat bagi daerah khususnya Padang Pariaman untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi dan temuan temuan untuk perbaikan ke depan untuk pertanggungjawaban keuangan.

Dia melanjutkan, bahwa setiap pengeluaran dan penggunaan anggaran daerah yang dilakukan akan disampaikan

melalui laporan keuangan yang nantinya akan diperiksa kebenarannya oleh BPK.

Untuk itu dia meminta kepada kepala perangkat daerah untuk merespon cepat permintaan data dan bahan bahan yang dibutuhkan dalam mendukung pemeriksaan ini.

"Setiap anggaran yang digunakan wajib kita pertanggung jawabkan, untuk itu saya minta respon cepat dari kepala perangkat daerah terhadap permintaan data dari BPK," pintanya.

Terakhir ia meminta kepada tim yang menyusun LKPD Padang Pariaman tahun 2024 untuk menyajikan data yang akurat dan tepat.

"Sehingga pemeriksaan

berjalan dengan lancar dan semoga kita kembali meraih opini WTP," tutupnya

Sebelumnya Dedi Effendi selalu Pengendali Tenis dalam Tim Pemeriksaan menyampaikan bahwa pemeriksaan keuangan dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK RI Nomor 1 tahun 2017.

Pemeriksaan yang akan berlangsung selama 27 hari yakni tanggal 3 Februari sampai 1 Maret 2025 akan mengambil sampel pemeriksaan atas sejumlah OPD.

"Selanjutnya akan dilakukan pengujian fisik secara uji petik di lokasi, uji petik juga akan

dikomunikasikan kemudian kepada OPD teknis terkait secara tertulis," sebut Dedi.

Selanjutnya Dedi menjelaskan tujuan pemeriksaan Interim ini untuk mendukung perencanaan pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2024 dalam pemberian opini, dan kegiatan pemeriksaan interim/pendahuluan.

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, kemudian menilai efektivitas SPI dalam penyusunan laporan keuangan.

Selanjutnya melakukan pengujian substantif terbatas pada transaksi/saldo akun-akun menilai kewajaran saldo, dengan prioritas pada akun kas,

belanja modal, belanja barang, dan jasa, penerimaan pembiayaan (terkait pinjaman daerah) dan aset tetap serta menilai kepatuhan atas peraturan perundang-undangan.

Terakhir Dedi mohon dukungan Pemkab Padang Pariaman dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, sehingga kegiatan pemeriksaan berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

"Komunikasi antara Pemkab Padang Pariaman dengan tim pemeriksa BPK diharapkan dapat berjalan dengan baik, dengan tetap menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalisme," tutup Dedi. (h/ahr)